LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 03 / /PN-KT/2017
TANGGAL : FEBRUARI 2017

# DOKUMEN

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
## TA.2017-2022

# NAGARI KUBU TAPAN

## Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
## Kabupaten Pesisir Selatan
## Propinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI

COVER hal

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Nagari

2.1.2. Demografi

2.1.3. Keadaan Sosial

2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari

2.2.1. Pembagian Wilayah

2.2.2. Struktur Organisasi Nagari

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah

3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi Dan Misi

4.1.1. Visi Nagari

4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

4.2.2 Potensi Dan Masalah

4.2.3 Program Pembangunan Nagari

4.2.4 Strategi Pencapaian

Dipindai dengan CamScanner

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)**

**NAGARI KUBU TAPAN**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

**NOMOR : 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM)**

**TAHUN 2017 - 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN**

**Menimbang** :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kubu Tahun 2017-2022.

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perludibahas dan disepakati RPJM Nagari 2017-2022 antara Wali Nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM-Nagari 2017-2022

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus

Dipindai dengan CamScanner

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

10. Peraturan Daerah Kabupaten 03 Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KESATU : MEMBAHASRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

DisePAKATI di : Kubu

Pada Tanggal :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS )**

**NAGARI KUBU TAPAN**

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN RENAH AMPEK HULU TAPAN BAMUS KABUPATEN KUBU TAPAN

**ANDRIADI. MPd**

Dipindai dengan CamScanner

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAWALI NAGARI DAN BAMUS**

Nomor : 03/WN-KT/ I / 2017

Nomor : 01/BMS -KT/I / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH (RPJM)

TAHUN 2017-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYAFRIADI AHMAD** : Wali Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **ANDRIADI, MPD** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BamusNagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (Bamus) Nagari Kubu Tapan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan RPJM 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

Dipindai dengan CamScanner

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN WALI NAGARI KURAO TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN | BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN BAMUS KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| **SYAFRIADI AHMAD** | **ANDRIADI, MPD** |

Dipindai dengan CamScanner

# WALI NAGARI KUBU TAPAN
# KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
# KABUPATEN PESISIR SELATAN

## PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
**NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)**
**TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**WALI NAGARI KUBU TAPAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala Kampung, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten .....' No. .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Nagari;

**Dengan Kesepakatan Bersama**
**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN**
**dan**
**WALI NAGARI KUBU TAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-NAGARI) TAHUN 2017 2022**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## BAB II

## TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2017-2022

### Pasal 2

1. Rencangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagariyang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagaripenyusunan RPJM untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJM menjadi dokumen RPJM-Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagarimengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundangkan dalam Lembaran Nagari

Dipindai dengan CamScanner

## BAB III

## MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

### Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagarimengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundangkan dalam Lembaran Nagari:
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## BAB IV

## VISI DAN MISI

### Pasal 4

Visi : Terwujudnya nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang Bersih, mandiri dalam pembangunan Disegala bidang dan mensejanterakan Masyarakat pada tantanan Adat dan Agama

### Pasal 5

Misi :

1. Mewujutkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia ( SDM ) maupun sumber daya alam ( SDA )
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

Dipindai dengan CamScanner

## BAB V
## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
### Pasal 6

**Strategi Pembangunan Nagari :**

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### Pasal 7

**Arah Kebijakan Keuangan Nagari :**

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

### Pasal 8

**Arah Kebijakan Pembangunan Nagari:**

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif Kepala kampung
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari,
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

Dipindai dengan CamScanner

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM—Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

### Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 19 Februari 2017

**WALI NAGARI KUBU TAPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN IV PEK. KIJANG

**SYAFRIADI AHMAD**

Diundangkan di Nagari Kubu Tapan
**Sekretaris Nagari**

**LITNAWATI**

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagaridalam rangka Menggagas Masa Depan Nagari, tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Kubu Tapan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM-Nagari.

RPJM-Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Kubu Tapan yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan Nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu TapanKabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Kubu Tapan.

Kubu Tapan, Januari 2017

Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuat desa dinaruskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka Nagari diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Kubu ini merupakan rencana strategis Nagari Kubu Tapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingka Kabupaten. Spirit ini apabila dapagt dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

## 1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tanun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten .....' No. .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa:

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM-Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Nagari) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .

2. Dengan diberlakukannyaUndang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

Dipindai dengan CamScanner

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM-Nagari

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBNagari, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

Dipindai dengan CamScanner

# BAB II

# PROFILE NAGARI

## 2.1. KONDISI NAGARI

### 2.1.1. Sejarah Nagari

**Narasi tentang sejarah Nagari Kubu Tapan**

Awalnya Nagari Tapan berdiri dirintis oleh Payung Mahkudum Sakti dari Sumanik Pagaruyung beberapa tahun yang lalu. Setelah dirintis oleh Mahkudum Sakti datang lagi seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari Pagaruyung sesudah itu berdirilah Pondok / Pemondokan. Beberapa tahun kemudian berdirilah Koto dan setelah itu berdiri lagi yang dinamakan Dusun.

Sesuai dengan pegang pakai adat Tapan sekarang bahwasanya nenek / payung dari Makkudum Sakti, Pendam / kuburannya menjadi sejarah untuk masyarakat Tapan sehingga 2 X 1 Tahun masyarakat selalu berkunjung kepemakaman beliau, inilah tradisi adat masyarakat Tapan. Dalam kunjungan tersebut disamping membersihkan areal pemakaman, sekaligus membuka sejarah atau pencetus Dusun Tapan dan menaikan didalam suku yang ada dalam Nagari atau Dusun. Ada empat Suku di masyarakat Tapan yakni Suku Melayu Gedang, Suku Melayu Kecil, Suku Caniago dan Sikumbang. Diantara suku – suku yang dinaikan atau yang diutuskan oleh kaumnya untuk menjadi Penghulu, orang yang terpilih itu diNobatkan 0leh warisan dari Mahkudum sakti itulah berdirinya Nagari Tapan. Dengan adanya pertemuan nenek terdahulu maka berdirilah penghulu suku penghulu suku di Tapan tahun 1824, pada waktu itu juga berdiri adat istiadat oleh nenek terdahulu. Pada tahun yang sama mufakat orang tersebut diatas bahwasanya orang tua adat Mahkudum Sakti ditunjuk menjadi orang tua adat Nagari Tapan.

Sesuai dengan kenyataan pegang pakai adat yang ada dinagari, barang siapa yang menjadi penghulu maka orang itu dinobatkan atau dilantik oleh orang tua adat Nagari Tapan, Dan diberi gelar Mahkudum Sakti. Setelah berdiri adat, suku maka mufakatlah orang tersebut untuk pemimpin Nagari yang berdiri tahun 1824, empat suku itulah yang Dipimpin oleh 1 Wali Nagari di Tapan.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun cara pemilihan Wali Nagari pada waktu itu sistimnya ditunjuk oleh perwakilan 4 suku tersebut. Beberapa tahun kemudian sebelum Kemerdekaan tahun 1945 masih dipimpin oleh 1 Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali Nagari dipilih secara demokrasi / masyawarah. Pada tahun 1983 dengan adanya perkembangan penduduk maka dirobah oleh pemerintah pusat , Wali Nagari dirobah menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa. Pada tahun 1990, dirobah lagi menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi 1 Wali Nagari Tapan. Kemudian, Tahun berikutnya ada perobahan lagi dari 1 Wali Nagari tersebut, 13 Desa menjadi 17 Kampung, dari 17 Kampung ini dipimpin oleh 1 Wali Nagari Tapan kembali.

Pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober, maka terjadilah pemekaran menjadi 8 NagariPada waktu itu sebagai Wali Nagari dipegang oleh Staf Kecamatan sebagai PJS. Tepatnya

Tanggal 112 Desember 2010 maka dilantiklah 8 Wali Nagari yang defenitif oleh oleh Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Pada Tahun 2012 Terjadi Pemekaran nagari Menjadi 20 Nagari dan untuk Nagari Kubu Tapan yang lama telah Menjadi Dua Nagari.

Nagari Kubu Tapan, awalnya berada di daerah pinggiran sungai air dang atau disebut dengan pondok lamo, pada zaman dahulu hanya beberapa keluarga yang berada di pondok lamo. transportasi di masa itu belum ada. masyarakatnya hanya berjalan kaki. Seiring waktu, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka masyarakatnya banyak pindah ke daerah bukit ( Talang ) sehingga di sebut Desa Talang Kubu, yang dipimpin oleh kepala Desa. Setelah pemekaran, Desa Talang Kubu menjadi Nagari Kubu Tapan yang dipimpin oleh Wali Nagari.

## 2.1.2.Demografi

**Narasi tentang kondisi umum Nagari**

**Letak dan luas wilayah**

Nagari Kubu Tapan salah dari delapan Nagari di wilayah Kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang terletak delapan km ke arah selatan dari kota keamatan. Nagari Kubu Tapan Mempunyai luas Wilayah kurang lebih 6500 Ha.

Dipindai dengan CamScanner

**Iklim**

Iklim Nagari Kubu Tapan sebagaimana daerha yang lainnya yang dilalui garis khatulistiwa yang beriklim Tropis, musim hujan dan musim kemarau hampir seimbang, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada dinagari Kubu Tapan

**Jumlah Penduduk**

Nagari Kubu Tapan mempunyai jumlah penduduk 1917 jiwa yang terdiri dari 2 Kampung dengan perincian sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK

| NO | KAMPUNG | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Bukit Lengkuas | 973 JIWA |
| 2 | Pondok Lamo | 944 JIWA |
| | JUMLAH | 1917 JIWA |

Dipindai dengan CamScanner

**Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Nagari Kubu Tapan dapat diliht pada tabel berikut ini :

| PRA SEKOLAH | S D | SLTP | SLTA | SARJANA |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 270 | 220 | 198 | 29 |

**Mata Pencaharian**

Nagari Kubu Tapan merupakan Nagari Pertanian, maka sebahagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan perincian sebagai berikut :

| PETANI | PEDAGANG | P N S | BURUH |
|---|---|---|---|
| 310 | 34 | 20 | 58 |

## 2.1.3. **Keadaan Sosial**

a. Idiologi

Idiologi masyarakat wilayah Nagari Kubu Tapan adalah Pancasila dan sampai saat ini belum di temukan yang beridiologi lain ataupun pengaruh lain yang datang dari luar

b. Politik

Masyarakat Nagari Kubu Tapan dalam berpolitik sangat menjunjung tinggi azas demokrasi, tidak pernah terjadi pertikaian antar Partai Politik dan Golongan

## 2.1.4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Nagari Kubu Tapan banyak keluarga miskin, karna umumnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah turun kesawah dan berkebun. Sementara untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah pendapatan tidak bisa karna kurangnya pengetahuan dan modal usaha

Dipindai dengan CamScanner

## 2.1 Kondisi Pemerintahan Nagari

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Nagari

### 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Nagari Kubu Tapan, kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari Delapan Nagari di kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang mempunyai jarak 164 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan sendiri merupakan salah satu dari 12 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Kubu Tapan sendiri terletak di perbatasan sebelah barat dengan PT Incasi Raya utara Nagari Batang Arah Tapan, timur Nagari Batang Arah Tapan, dan selatan berbatasan Nagari Simpang Gunung Tapan. Nagari Kubu Tapan letak topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Kubu Tapan terdiri dari 2 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), 3 orang kaur dan 2 orang Kepala Kampung ,mempunyai jumlah penduduk 1917 orang yang terdiri dari 917 orang laki-laki, 1.000 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 197 RTM.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Kubu Tapan merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

## STRUKTUR PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN

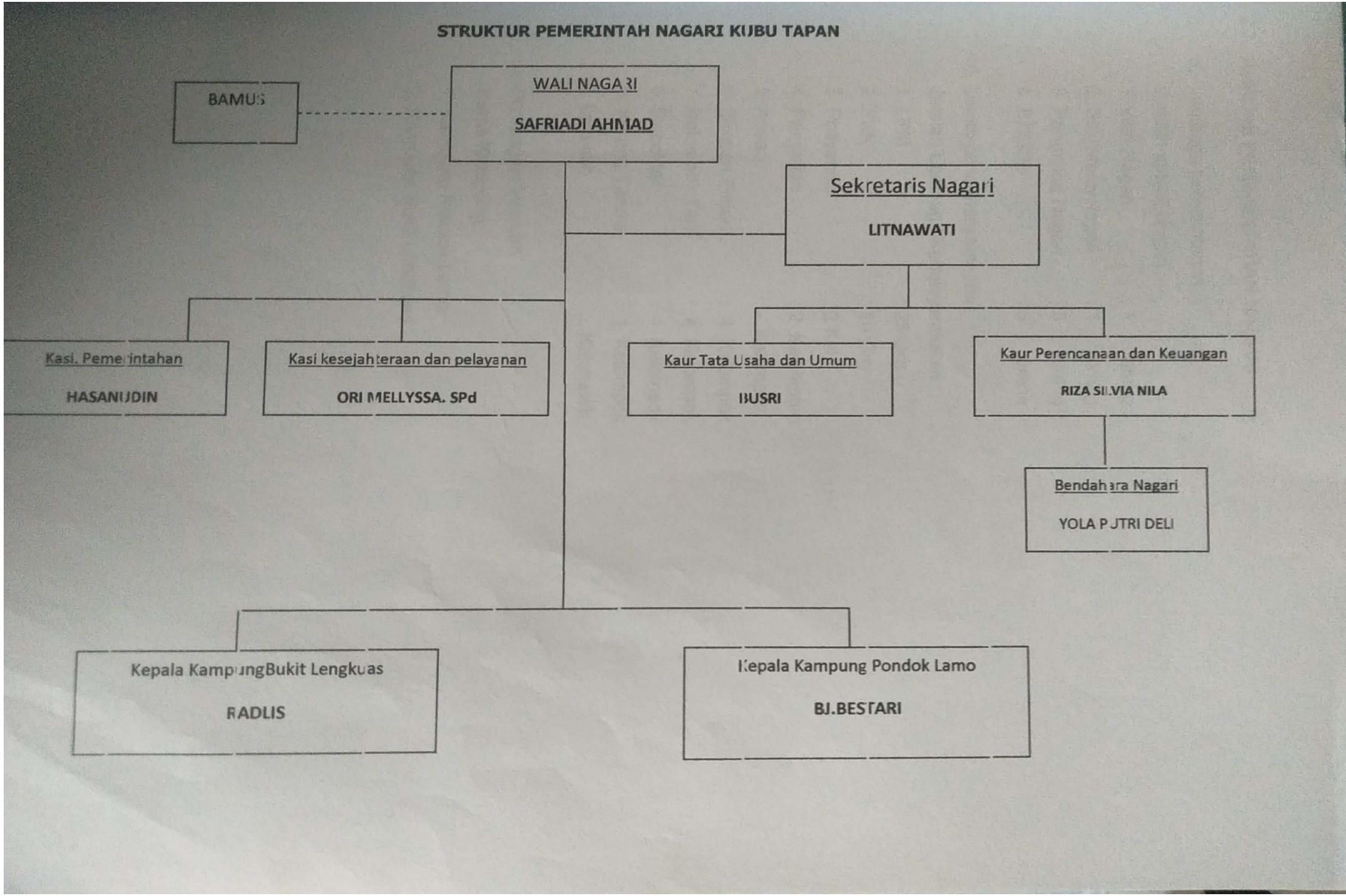


Dipindai dengan CamScanner

## 2.2. KONDISI PEMERINTAHAN NAGARI

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Nagari :

1. Wali Nagari : 1 orang
2. Sekretaris Nagari : 1 orang
3. Perangkat Nagari : 5 orang
4. BAMUS : 5 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 25 Org
2. PKK : 10 Org
3. Posyandu : 2 Kel
4. Pengajian : 2 Kelompok
5. Arisan : - Kelompok
6. Simpan Pinjam : 4 Kelompok
7. Kelompok Tani : 4 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Lain-lain : ... Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Kampung :

1. Kampung Pondok Lamo
2. Kampung Bukit Lengkuas

Dipindai dengan CamScanner

## SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

## NAGARI KUBU TAPAN

## KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

## KABUPATEN PESISIR SELATAN

**NAMA-NAMA APARAT NAGARI :**

| | |
|---|---|
| Wali Nagari | : SYAFRIADI AHMAD |
| Sekretaris Nagari | : LITNAWATI |
| Kasi Pemerintahan | : HASANUDIN |
| Kasi kesejahteraan dan pelayanan | : ORI MELLYSSA. SPd |
| Kaur Perencanaan dan keuangan | : RIZA SILPIA NILA |
| Kaur Tata Usaha dan Umum | : BUSRI |
| Bendahara Nagari | : YOLA PUTRI DELI |

Kepala Kampung

1. Kampung Pondok Lamo : BJ. BESTARI
2. Kampung Bukit Lengkuas : RADLIS

Dipindai dengan CamScanner

# SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

# NAGARI KUBU TAPAN

# KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

# KABUPATEN PESISIR SELATAN

---

## NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ( BAMUS )

| | |
|---|---|
| Ketua | : ANDRIADI. MPd |
| Wakil Ketua | : SYAMSUL |
| sekretaris | : ILHAMDI KAMAL |
| Anggota | : 1.DANASMERI |
| | 2.AFRUDDIN |

Dipindai dengan CamScanner

# BAB III

# MASALAH DAN POTENSI

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA

## NAGARI KUBU TAPAN

| No | MASALAH | POTENSI |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Tidak lancarnya transportasi di jalan pematang panjang. | Perkebunan, persawahan dan tenaga local ada |
| 2. | 2. Kurangyna kemampuan masyarakat untuk membeli bibit sapi ternak.ekonomi. | Petani dan lahan ada |
| 3. | 3. Tidak mampu masyarakat untuk membeli bibit ikan.ekonomi . | Petani dan lahan ada |
| 4. | 4. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian untuk membawa ke rumah karna tidak ada jalan usaha tani. fisik | Lahan dan tenaga lokal ada |
| 5. | 5. Kurangnya skill masyarakat tentang pelatihan bodir. Sosial . | Masyarakat ada |
| 6. | 6. Kurangya ketrampilan masyarakat tentang industri rumah tangga.sosial | Petani dan masyarakat ada |
| 7 | 7. Masyarakat sulit mengembangkan usaha karena tidak ada modal , | Masyarakat dan lahan ada |
| 8 | 8. Anak-anak usia dini belum mendapatkan pendidikan.fisik | Anak-anak dan sekolah |
| 9 | 9. Kurangya pendiddikan agama dikalangan anak-anak dan masyarakat.fisik | Anak-anak dan lahan ada |
| 10 | 10. Kurangyan lahan pemukiman masyarakat.fisik | Badan jalan dan tenaga lokal |
| 11 | 11. Pelajar-pelajar dan masyarakat belum mengenal leptop apalagi penggunaannya.pendidikan | Anak-anak usia sekolah |
| 12 | 12. Musim hujan banyak tanah Pesawahan dan Pemukiman penduduk longsor karena banjir | Tenaga kerja, batu kali, pasir, kerikil tersedia |
| 13 | 13. Tidak tersedianya alat transportasi Pemerintah Nagari . | Tenaga ada |
| 14 | 14. Tidak tertampungnya jemaah disaat kegiatan pada hari besar Islam | Tenaga kerja dan lokasi ada |
| 15 | 15. Batas Kampung dan Nagari tidak jelas . | Tenaga kerja , batu kali, pasir, kerikil ada |
| 16 | 16. Banyaknya genangan dimusim hujan yang tidak mengalir . | Batu kali, pasir, kerikil, tenga kerja |
| 17 | 17. Banyaknya jumlah ternak yang berkeliaran . | Kotoran ternak |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 18 | 1. Minimnya tunjangan kader pos yandu / PMT / BKB | Kader ada |
| 19 | 2. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat . | Pasir, Batu kali, tenaga kerja ada |
| 20 | 3. Minimnya tunjangan kesejahteraan Guru MDA / TPA | Lokasi ada |
| 21 | 4. Tingginya minat masyarakat untuk mengebangkan usaha kecil | Lokasi ada |
| 22 | 5. Kurangnya minat masyarakat mendalami agama | Tempat tersedia |
| 23 | 6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan Jenazah | Tempat tersedia |
| 24 | 7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan makanan | Tempat tersedia |
| 25 | 8. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Ijazah | Tenaga Pengajar ada |
| 26 | 9. Banyaknya murid yang tamat SMP kesulitan transportasi karena jangkauan SMA yang ada ukup jauh | Lokasi ada, murid ada |
| 27 | 10 Tingginya minat masyarakat untuk mengebangkan usaha kecil | Kelompok usaha SPP PNPM |
| 28 | 11. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian | Lokasi ada |
| 29 | 12. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi | Lokasi dan tenaga kerja ada |
| 30 | 13. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam | Lokasi ada |
| 31 | 14. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan | Lokasi ada |
| 32 | 15. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura | Lokasi ada |
| 33 | 1. Kurang lancarnya pembuangan air sehingga terjadinya banjir | Sawah atau lahan perkebunan |
| 34 | 2. Tidak mampunya masyarakat untuk membeli bibit ternak sapi | Petani dan lahan ada |
| 35 | 3. Sering terjadinya kekurangan air pada lahan pertanian nagari Kubu | Lahan dan tenaga lokal |
| 36 | 4. Masyarakat sulit untuk mendapatkan bibit unggul | Petani dan lahan ada |
| 37 | 5. Sering terjadinya kebanjiran pada lahan perkebunan masyarakat di rawa pasung saaat hujan deras | Lahan dan tenaga lokal |
| 38 | 6. Sulitnya masyarakat membawa hasil usaha tani ke lokasi pemukiman | Lahan dan tenaga lokal |
| 39 | 7. Masyarakat kurang mengenal tentang pendidikan komputer | Masyarakat ada |
| 40 | 8. Meningkatkan keterampilan menjahit | Masyarakat ada |
| 41 | 9. Kurangnya keterampilan tentang perbengkelan | Masyarakat ada |

Dipindai dengan CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 42 | 10. Rusaknya jalan dari pondok lamo menuju batang arah | Jalan dan tenaga lokal ada |
| 43 | 11. Kurang mampunya orang tua murid untuk membayar honor guru PAUD | Gedung paud dan murid ada |
| 44 | 12. Tidak adanya gedung Wali Nagari Kubu Tapan | Lahan ada |
| 45 | 13. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok | Lahan dan SDM ada |
| 46 | 14. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap | Lahan dan SDM ada |
| 47 | 15. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pegawai Masjid | Masyaraka ada |
| 48 | 16. Tingginya minat masyarakat untuk mengebangkan usaha kecil | Lokasi dan maasyarakat ada |
| 49 | 17. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian | Lahan pertanian ada |
| 50 | 18. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi | Lokasi ada |
| 51 | 19. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam | Lokasi ada |
| 52 | 20. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan | Lokasi ada |
| 53 | 21. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura | Lahan ada |

Dipindai dengan CamScanner

# KALENDER MUSIM NAGARI KUBU TAPAN

| Masalah/ Keadaan/ | Hujan | | | | | Pancaroba | | | Kemarau | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agst. |
| Masa tanam | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | | | | | |
| Masa panen | ** | ** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Banjir | | | ** | *** | *** | *** | *** | | | | | |
| Kesehatan | ** | ** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** |
| - Penyakit malari | | | | ** | *** | *** | | | | | | |
| - Penyakit diare | * | | | ** | *** | *** | | | | | *** | **** |
| - Penyakit campak | | | | | | | | * | ** | *** | | |
| Kekurangan pangan | ** | | | | | | | | ** | ** | ** | ** |
| Kekurangan air | | | | | | | | ** | ** | ** | ** | ***** |

Dipindai dengan CamScanner

# BAB IV
# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

## 4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampungdapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Kubu Tapan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

### 4.1.1 Visi Desa

***"Kebersamaan Dalam Membangun Demi Nagari Kubu Tapan Yang Lebih Maju"***

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Kubu Tapan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Nagari Kubu Tapan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

### 4.1.2 Misi

1. Mewujutkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia ( SDM ) maupun sumber daya alam ( SDA )
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

## 4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Kepala Kampung, Pemerintah Nagari beserta Bamus dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakatiproses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari. pemberdayaan masyarakat di Nagari. partisipasi masyarakat. siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampung.Pemerintah Nagari beserta Bamus membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampung, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Dipindai dengan CamScanner

### 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

a). Arah Pengelolahan Pendapatan Nagari

- Pendapatan Nagari bersumber APB Nagari dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Nagari dipungut oleh Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Wali Nagari.
- Pendapatan dari APB Nagari dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Nagari.

b). Arah Pengelolahan Belanja Nagari

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional Bamus;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Nagari bersama Bamus melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Nagari.

### 4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Nagari Kubu adalah sumberdaya alam yang dimiliki Nagari seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah,perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dipindai dengan CamScanner

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Nagari Kubu adalah tenaga, kader kesehatan,kader pertanian, dantersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Nagari Kubu adalah banyaknya lembaga-lembaga yanga ada dimasyarakat seperti LPMN.Gapoktan.Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam,Posyandu,Karang Taruna ,Risma ,dan lani-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Nagari Kubu adanya Lahan-Lahan Pertanian,Perkebunan,maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan,Perikanan.

Nagari Kubu Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan Nagari yang dikelola Nagari

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Nagari
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Nagari

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi

Dipindai dengan CamScanner

3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau

Dipindai dengan CamScanner

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

### 4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional Bamus;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

### 4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Nagari Binjai dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Nagari Kubu sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Nagari dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Nagari..

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan Nagari.

1. Pembangunan Nagari diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

Dipindai dengan CamScanner

# BAB V
# PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Nagari.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Wali Nagari Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Wali Nagari silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Dipindai dengan CamScanner

# RANCANGAN RPJM NAGARI
## TAHUN : 2017 - 2022

NAGARI : KUBU TAPAN
KECAMATAN : RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi (RT/ RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang | | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s |
| | | a. | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | |
| | | 1 | | Penghasilan tetap Wali Negari dan Perangkat | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 148.200.000 | ADD | √ | | |
| | | 2 | | Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 49.200.000 | ADD | √ | | |
| | | 3 | | Tunjangan Kehormatan Bamus | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 49.200.000 | ADD | √ | | |
| | | 4 | | Tunjangan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8.448.000 | ADD | √ | | |
| | | 5 | | Insentif WaLNag | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12.000.000 | APB Prov | √ | | |
| | | 6 | | Operasional Perkantoran | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 28.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 7 | | Operasinal BAMUS Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 10.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 8 | | Operasional Pemungutan PBB | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.525.890,22 | ADD | √ | | |
| | | 9 | | Kegiatan Pendataan Aset | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3.157.406,56 | ADD | √ | | |
| | | 10 | | Validasi Profil / IDM | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.500.000 | ADD | √ | | |
| | | 11 | | Musyawarah Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 12 | | Operasional Raskin | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3.830.419,00 | PBK | √ | | |
| 1 | **Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari** | 13 | | Musrenbang Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 14 | | Entri Data RPJM | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.200.000 | ADD | √ | | |
| | | 15 | | Pengelola Keuangan Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.750.000,00 | ADD | √ | | |
| | | 16 | | Pendataan Rumah dan Jumlah Penduduk | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 17 | | Pembangunan Lonteng dan Pagar Kantor Wali Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30.688.242 | ADD | √ | | |
| | | 18 | | Pengadaan Mobiler Kantor Wali | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 19 | | Kendaraan Dinas | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20.000.000 | ADD | √ | | |
| | | 20 | | Penegasan dan Penetapan Batas Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5.000.000,00 | ADD | √ | | |
| | | 21 | | Pelaksanaan Lomba Nagari | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11.711.668,06 | ADD | √ | | |
| | | 22 | | Honor Tim verifikasi Usulan | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 900.000 | ADD | √ | | |
| | | 23 | | Honor tim penerima hasil pekerjaan | Kubu | 12 Bulan | Nagari | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 600.000 | ADD | √ | | |
| | | g. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | **420.911.626** | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Pengerasan Jalan pematang panjang ( Rabat Beton ) | Kubu | 4.000 M | Melancarkan Transportasi | | √ | | | | | 30.000.000 | ADD | √ | | |
| 2 | | Pengeringan Rawa pematang panjangseluas 50 Ha | Kubu | 50 M | Melancarkan alirun Air | | | √ | | | | 150.000.000 | DD | √ | | |
| 3 | | Pembukaan jalan usaha Tani | Kubu | 1.800 M | Membuka lahan tidur | √ | | | | | | 72.000.000 | DD | √ | | |
| 4 | | Pembangunan Drainase | Kubu | 150 M | Melancarkan alirun Air | √ | | | | | | 81.000.000 | DD | √ | | |
| 5 | | pembangunan Jembatan Sungai Kasai | Kubu | 1 Unit | Melancarkan Transportasi | √ | | | | | | 126.000.000 | DD | √ | | |
| 6 | | Pembuatan Bandar Persawahan | Kubu | 300 M | Meningkatkan pertanian | √ | | | | | | 35.000.000 | DD | √ | | |
| 7 | | Pembangunan Drainase | Kubu | 120 M | Melancarkan alirun Air | √ | | | | | | 76.000.000 | DD | √ | | |
| 8 | | Pengerasan Jalan ( Sirtu ) | Kubu | 200 M | Melancarkan Transportasi | √ | | | | | | 40.000.000 | DD | √ | | |
| 9 | | Pembangunan bedah Rumah | Kubu | 4 Unit | | √ | | | | | | 60.000.000 | DD | √ | | |
| 10 | | Pengerasan Jalan ( Rabat Beton ) | Kubu | 450 | Melancarkan Transportasi | √ | | | | | | 140.000.000 | DD | √ | | |
| 11 | | Pembagunan Jalan Rabat Beton Panjang 2000 meter, lebar 4 meter | Kubu | 2.000 M | Melancarkan Transportasi | | √ | | | | | 25.000.000 | ADD | √ | | |
| 12 | | Pembangunan jalan baru sepanjang 2 km | Kubu | 2.000 M | Perluasan Kampung | | | | | √ | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| 13 | | Pembangunan gedung pesantren 1 unit | Kubu | 1 Unit | Anak Remaja | | | | √ | | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| 14 | | Pembangunan Gedung Pertemuan 1 Unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Negari | | √ | | | | | 40.000.000 | DD | √ | | |
| 15 | | Pembangunan Gedung MDA/TPA/TPSA 1 unit | Kubu | 1 Unit | Rumah Tangga Miskin | | √ | | | | | 150.000.000 | DD | √ | | |
| 16 | | Pembangunan MCK untuk masyarakat 80 unit | Kubu | 80 Unit | Rumah Tangga Miskin | | | | | | √ | 200.000.000 | DD | √ | | |
| 17 | | Pembangunan gedung PAUD dan TK Integrasi dan Plus 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Negari | | | √ | | | | 250.000.000 | DD | √ | | |
| 18 | | Pembagunan Lapangan Bola Kaki Bola Volly, Bola Tangan, dll | Kubu | 1 Unit | Pemuda | | | | | √ | | 200.000.000 | DD | √ | | |
| 19 | | Pembangunan jalan baru sepanjang 1000 meter | Kubu | 1.000 M | Membuka lahan tidur | | | √ | | | | 1.500.000.000 | DD | √ | | √ |
| 20 | | Pembangunan sumur Bor dan penyediaan tank air bersih 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Miskin | | √ | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| 22 | | Pembagunan Pos jaga secara permanen 1 unit | Kubu | 1 Unit | Menjaga keamanan Negari | | | | √ | | | 30.000.000 | DD | √ | | |
| 23 | | Pembangunan pagar seragam sepanjang 1200 meter | Kubu | 1.200 M | Masyarakat Negari | | | | | | √ | 150.000.000 | DD | √ | | |
| 24 | | Pembangunan pasar Tradisional | Kubu | 1 Unit | Masyarakat / Pedagang | | | √ | | | | 1.500.000.000 | DD | √ | | √ |
| 25 | | Pembagunan tambahan Gedung SD sebanya 3 lokal lengkap mobiler | Kubu | 3 Lokal | Masyarakat Negari | | | | | √ | | 75.000.000 | DD | √ | | |
| 26 | | Pembagunan irigasi persawahan sepnjang 2 km | Kubu | 2.000 M | Meningkatkan Hasil pertanian | | | | √ | | | 400.000.000 | DD | √ | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | Pembangunan Kepala Bendar | Kubu | 1 Unit | Meningkatkan Hasil pertanian | | √ | | | | | 80.000.000 | DD | √ | | | |
| 28 | | Pembangunan sekolah TK | Kubu | 1 Unit | | | | | √ | | | 120.000.000 | DD | √ | | | |
| 29 | | Perbaikan lantai Jembatan sungai serik dengan beton | Kubu | 1 Unit | Melancarkan Transportasi | | | √ | | | | 250.000.000 | DD | √ | | | |
| 30 | | Pembangunan MDA 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat | | | | | | √ | 100.000.000 | DD | √ | | | |
| 31 | | Pembangunan Kantor Wali Nagari Kbu Tapan 1 unit lengkap mobiler | Kubu | 1 Unit | Meningkatkan Pelayanan | | | | √ | | | 175.000.000 | DD | √ | | | |
| 32 | | Pembangunan gedung Polindes yang permanen 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat | | | | | √ | | 3.000.000.000 | DD | √ | | | |
| 33 | | Pengaspalan jalan dari pondok lamo ke kampung tengah sepanjang 1000 meter | Kubu | 1.000 M | Perluasan Kampung | | | | | | √ | 150.000.000 | DD | √ | | | |
| 34 | | Pembagunan saluran irigasi pondok baru sepanjang 1 km | Kubu | 1.000 M | Meningkatkan Hasil pertanian | | | | | | √ | 2.000.000.000 | DD | √ | | | √ |
| 35 | | Pembangunan bendungan mini di kepala bandar 1 unit | Kubu | 1 Unit | Meningkatkan Hasil pertanian | | | | | √ | | 1.500.000.000 | DD | √ | | | √ |
| 36 | | Pembagunan balai-balai 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat | | | √ | | | | 80.000.000 | DD | √ | | | |
| 37 | | Pembagunan mesjid mujahidin 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat | | | | √ | | | 117.837.100 | DD | √ | | | |
| 38 | | Pembangunan gedung pertemun pemuda nagari kubu tapan 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | | |
| 39 | | Perbaikan lapangan bola kaki Nagari Kubu Tapan 1 Ha | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 76.000.000 | DD | √ | | | |
| 40 | | Perbaikan saluran air serik sepanjang 1 km | Kubu | 1.000 M | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 80.000.000 | DD | √ | | | |
| 41 | | Pembangunan sekolah SMA di Nagari Kubu Tapan 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | | √ | 90.000.000 | DD | √ | | | |
| 42 | | Pembangunan WC di rumah masyarakat yang tidak mampu 30 unit | Kubu | 30 Unit | Masyarakat Miskin | | | | | √ | | 120.000.000 | DD | √ | | | |
| 43 | | Pembangunan gedung MDA / TPA 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | √ | | 800.000.000 | DD | √ | | | |
| 44 | | Pengeringan rawa gesik sepanjang 1 km | Kubu | 1.000 M | Kelompok Tani | | | √ | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 45 | | Pembangunan gedung PAUD 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 75.000.000 | DD | √ | | | |
| 46 | | Pembangunan sumur Bor dan penyediaan tank air bersih 1 unit | Kubu | 1 Unit | Rumah Tangga Miskin | | | | √ | | | 110.000.000 | DD | √ | | | |
| 47 | | Pembangunan gedung SD 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | | √ | 117.837.100 | DD | √ | | | |
| 48 | | Pembagunan aliran air ke pemukiman masyarakat sepanjang 1 km | Kubu | 1.000 M | Masyarakat Nagari | | | | | √ | | 101.308.134 | DD | √ | | | |
| 49 | | Pembangunan Pasar Sore | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 80.000.000 | DD | √ | | | |
| 50 | | Pembangunan pagara seragam sepanjang 3 km | Kubu | 3.000 M | Masyarakat Nagari | | | √ | | | | 80.000.000 | DD | √ | | | |
| 51 | | Pembangunan Gedung Polindes 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 750.000.000 | DD | √ | | | |
| 52 | | Pembangunan gedung Sanggar Budaya 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 150.000.000 | DD | √ | | | |
| 53 | | Pembangunan gedung Poskesri 1 unit | Kubu | 1 Unit | Meningkatkan kesehatan | | | | | √ | | 200.000.000 | DD | √ | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | Pembangunan lapangan bola 1 ha | Kubu | 1 Paket | Meningkatkan kegiatan Olah raga | | | | √ | | | 450.000.000 | DD | √ | | | |
| 55 | | Pembangunan Tugu Batas kampung dan nagari 4 unit | Kubu | 4 Unit | Batas Wilayah Nagari | | √ | | | | | 15.000.000 | DD | √ | | | |
| 56 | | Pembangunan gedung mesjid 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | | √ | 300.000.000 | DD | √ | | | |
| 57 | | Pembagunan gedung PUSKESMAS 1 unit | Kubu | 1 Unit | Meningkatkan kesehatan | | | √ | | | √ | 600.000.000 | DD | √ | | | |
| 58 | | Perbaikan Irigasi sepanjang 1 km | Kubu | 1.000 M | Melancarkan Air Sawah | | | | | | | 150.000.000 | DD | √ | | | |
| 59 | | Pembangunan Irigasi | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 500.000.000 | DD | √ | | | |
| 60 | | Pengadaan alat pengolah tanah ( traktor ) 1 paket | Kubu | Paket | Kelompok Tani | | | | | | √ | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 61 | | Pembukaan jalan usaha Tan | Kubu | 2.000 M | Membuka lahan tidur | | √ | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | | |
| 62 | | Pembangunan Drainase | Kubu | 200 M | Melancarkan aliran Air | | √ | | | | | 75.000.000 | DD | √ | | | |
| 63 | | Pembukaan jalan sungai Puyu | Kubu | 2.000 M | Membuka lahan tidur | | | √ | | | | 150.000.000 | DD | √ | | | |
| 64 | | Penimbunan taman Masjid Mujahidin | Kubu | 20 x 30 M | Masyarakat Nagari | | | √ | | | | 60.000.000 | DD | √ | | | |
| 65 | | Pemasangan tiang Listrik | Kubu | 10 Bh | Masyarakat Miskin | | | | | √ | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 66 | | Pembangunan Balai Pertemuan | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 100.000.000 | DD | √ | | | |
| 67 | | Pembangunan Berorjong | Kubu | 100 M | Penahan Tebing | | | √ | | | | 200.000.000 | DD | √ | | | |
| 68 | | Penambahan Balai-Balai Kuburan | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 70.000.000 | DD | √ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Per Halaman 2 | | | | | | | 18.952.982.334 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Bantuan modal bergulir bagi kelompok tani untuk 3 kelompok | Kubu | 3 Kel | Kelompok Tani | | | | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 2 | | Pengadaan bibit sapi dan pelatihan beternak sapi 5 kelompok | Kubu | 5 Kel | Kelompok Tani | | | | √ | | | 100.000.000 | DD | √ | | | |
| 3 | | Bantuan kelompok LKMA Pertanian di Nagari sebanyak 1 kelompok | Kubu | 1 Kel | Kelompok Tani | √ | | | | | | 900.000 | ADD | √ | | | |
| 4 | | Bantuan Modal bagi kelompok Peternakan | Kubu | 3 Kel | Kelompok Tani | √ | | | | | | | ADD | √ | | | |
| 5 | | 1 Kubu Tapan | Kubu | | | | | | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 6 | | 2 Kubu Mandiri | Kubu | | | | | | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 7 | | 3 Kubu Sejahtera | Kubu | | | | | | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |
| 8 | | Membanguan Koperasi Nagari 1 unit | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | √ | | | | | | 10.741.171 | ADD | √ | | | |
| 9 | | Bantuan bibit ikan lele untuk 6 kelompok tani | Kubu | 6 Kel | Kelompok Tani | | | √ | | | | 50.000.000 | DD | √ | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | Bantuan bibit ayam untuk 10 kelompok tani | Kubu | 10 Kel | Rumah Tangga Miskin | √ | | | | | | 5.000.000 | ADD | √ | | |
| | 11 | | Bantuan bibit kambing untuk 10 kelompok tani | Kubu | 10 Kel | Rumah Tangga Miskin | | √ | | | | | 40.000.000 | ADD | √ | | |
| | 12 | | Sosialisasi bagi warga Penertiban ternak | Kubu | Ls | Masyarakat Nagari | | | | | | | 10.000.000 | ADD | √ | | |
| | 13 | | Pengadaan taman bacaan masyarakat | Kubu | 1 Paket | Masyarakat Nagari | | √ | | | | | 75.000.000 | DD | √ | | |
| | 14 | | Bea siswa untuk anak yang tamat SMA untuk 30 siswa | Kubu | 30 Org | Rumah Tangga Miskin | | | | √ | | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | 15 | | Bea siswa untuk anak Sekolah untuk 100 siswa | Kubu | 100 Org | Rumah Tangga Miskin | | | √ | | | | 150.000.000 | DD | √ | | |
| | 16 | | Penyuluhan tentang baca Alqur'an | Kubu | Ls | Masyarakat Nagari | | | | | | √ | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | 17 | | Bantuan honor guru TPA yang memadai untuk 5 orang | Kubu | 5 Org | Kesejahteraan Guru | | | √ | | | | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | 18 | | Pengadaan alat musik tradisional 1 Paket | Kubu | 1 Paket | Masyarakat Nagari | | | | | √ | | 75.000.000 | DD | √ | | |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 19 | | Kelompok Belajar untuk wanita yang buta huruf sebanyak 60 orang | Kubu | 60 Org | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 30.000.000 | DD | √ | | |
| | 20 | | Membentuk kelompok Belajar kesenian tradisional pencak silat sebanyak 30 orang | Kubu | 30 Org | Masyarakat Nagari | | | | | | √ | 20.000.000 | DD | √ | | |
| | 21 | | Pengadaan alat kesenian tradisional 1 Paket | Kubu | 1 Paket | Masyarakat Nagari | | | √ | | | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | 23 | | Sosialisasi Bagi Orang Tua Murid untuk Pendidikan | Kubu | Ls | Orang Tua Murid | | √ | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 24 | | Bantuan honor guru PAUD yang memadai untuk 6 orang | Kubu | 6 Org | Kesejahteraan Guru | | √ | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 25 | | Bantuan kesejahteraan bagi kader PKK sebanyak 10 orang | Kubu | 10 Org | Kader PKK | | | | | √ | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | 26 | | Penyuluhan bahaya miras | Kubu | Ls | Masyarakat Nagari | | | √ | | | | 40.000.000 | DD | √ | | |
| | 27 | | Bantuan PMT balita dan gizi ibu hamil untuk 20 ibu hamil dan balita | Kubu | 20 Org | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 28 | | Bantuan PMT Balita untuk 20 balita | Kubu | 20 Org | Rumah Tangga Miskin | √ | | | | | | 30.000.000 | ADD | √ | | |
| | 29 | | Pinjaman modal dan pelatihan 100 KK Miskin | Kubu | 100 Org | Rumah Tangga Miskin | | | √ | | | | 25.000.000 | ADD | √ | | |
| | 30 | | Bantuan Sosial untuk nenek jompo 4 orang | Kubu | 4 Org | Orang Jompo | | | | | | √ | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | 31 | | Bantuan Sosial untuk anak idiot 4 orang | Kubu | 4 Org | Kesejahteraan | | | | √ | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 32 | | Bantuan Sosial untuk anak sakit parah 5 orang | Kubu | 5 Org | Kesejahteraan | | | | | √ | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | 33 | | Pengadaan Alat PKK 1 paket | Kubu | 1 Paket | PKK Nagari | √ | | | | | | 5.000.000 | ADD | √ | | |
| | 34 | | Pengadaan alat pembasmi hama ( spayer ) 1 paket | Kubu | 2 Paket | Kelompok Tani | | | | | | | 20.000.000 | DD | √ | | |
| | 35 | | Bantuan Bibit Unggul dan Pupuk kelompok tani | Kubu | 3 Kel | Kelompok Tani | | | | | | | | | √ | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | | 1. Kel. Tani Rawa Balbak | Kubu | | | | | | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 37 | | 2. Kel. Tani Sungai Srik | Kubu | | | | | | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 38 | | 3. Kel. Tani Sawah Lamo | Kubu | | | | | | | | | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | 40 | | Pembuatan tenda Nagari | Kubu | 2 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | | | | 30.000.000 | ADD | √ | | |
| | 41 | | Penyediaan alat memasak | Kubu | 1 Paket | PKK Nagari | | | | | | | | 10.000.000 | ADD | √ | | |
| | | | | | | | | Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | 1.891.641.171 | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Pelatihan peningkatan kapasitas | Kubu | 25 Org | Penikatan Kapasitas | | | √ | | | | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | 2 | | Pelatihan kelompok tani tentang pengerjaan sawah sebanyak 50 orang | Kubu | 50 Org | Kelompok Tani | | √ | | | | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | | 3 | | Pelatihan kelembagaan PKK sebanyak 15 orang | Kubu | 15 Org | Penikatan Kapasitas | | | | | √ | | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | 4 | | Pelatihan Kader PKK baik memasak, menjahit sebanyak 15 orang | Kubu | 15 Org | Penikatan Kapasitas | | √ | | | | | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | | 5 | | Pelatihan TPK Nagari | Kubu | 3 Org | Penikatan Kapasitas | √ | | | | | | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | | 7 | | Pelatihan Khatib | Kubu | 5 Org | Penikatan Kapasitas | √ | | | | | | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | | 8 | | Pelatihan Qasidah Rabana | Kubu | 30 Org | Penikatan Kapasitas | | | √ | | | | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | 9 | | Pelatihan pelaku LPMN Nagari sebanyak 25 orang | Kubu | 25 Org | Penikatan Kapasitas | | √ | | | | | 8.000.000 | DD | √ | | |
| | | 10 | | Pelatihan pelaku KPMN Nagari sebanyak 5 orang | Kubu | 5 Org | Penikatan Kapasitas | | | √ | | | | 5.000.000 | DD | √ | | |
| | | 12 | | Pelatihan tentang Pembentukan Sanggar Belajar sebanyak 50 orang | Kubu | 50 Org | Penikatan Kapasitas | | | | | √ | | 8.000.000 | DD | √ | | |
| | | 13 | | Sosialisasi Bagi Masyarakat untuk Pendidikan | Kubu | 30 Org | Masyarakat Nagari | | | √ | | | | 30.000.000 | DD | √ | | |
| | | 14 | | Pelatihan Aparatur Nagari | Kubu | 10 Org | Penikatan Kapasitas | √ | | | | | | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | 15 | | Pelatihan Bamus Nagari | Kubu | 5 Org | Penikatan Kapasitas | √ | | | | | | 10.000.000 | DD | √ | | |
| | | 16 | | Pendirian Koprasi Nagari | Kubu | 1 Unit | Masyarakat Nagari | | | | √ | | | 50.000.000 | DD | √ | | |
| | | 17 | | Pendirian Lumbung Pangan Nagari | Kubu | 2 Unit | Masyarakat Nagari | | | | | √ | | 100.000.000 | DD | √ | | |
| | | | | | | | | Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | JUMLAH TOTAL | | | | | | 316.000.000 | | | | |

Kabu Tapan, Februari 2017

Disusun oleh:

Tim Penyusun RUM nagari Kubu tapan

KADLIS

Mengetahui

Wali Nagari Kubu Tapan

PEMERINTAH KABUPATEN ... WALI NAGARI KUBU TAPAN

STAFFIN ... RAD

Dipindai dengan CamScanner

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**
**NAGARI KUBU TAPAN**

# KEPUTUSAN
**WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RAH TAPAN**
**Nomor : 04. /WN-KT/2017**

## TENTANG
## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI TAHUN 2017-2022

**WALI NAGARI KUBU TAPAN**

**Menimbang :**

a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari -Nagari

b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJM-Nagari).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

Dipindai dengan CamScanner

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan MenteriDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten .....' No. .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Pembina | :1. SYAFRIADI AHMAD | ( Wali Nagari ) |
| Ketua | :2. LITN AWATI | ( Sekretaris Nagari ) |
| Sekretaris | :3. M.YUISUF | ( Ketua LPMN ) |
| | 4. RADLIS | ( Aparatur Nagari) |
| | 5. BJ.BESTARI | ( Aparatur Nagari) |
| | 6. HERMANSYAH | ( LPMN) |
| | 7. BUSTAMI | ( LPMN) |
| | 8. LASMANITA | ( LPMN ) |
| | 9. ASRUL | ( KPMN ) |
| | 10. MUSTRA DEWI TIKA | ( KPMN ) |
| | 11. ORI MELLISSA | ( Unsur Perempuan ) |

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.



Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

Keempat : Tim Penyusun RPJM-Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari tahun 2017 – 2022 oleh Wali Nagari.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 13 Februari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN ESIS WALI NAGARI KUBU TAPAN

SYAFRIADI AHMAD

Dipindai dengan CamScanner